

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara yang juga dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026. Dengan terbitnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Kwandang, April 2023  
**Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Gorontalo Utara**

**Dr. FAIZAL PIU, SE. MM**  
**Nip. 19710109 199303 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>24</b>
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
3.2 Isu Strategis .....	25
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra .....	27
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	29
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>46</b>
7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	46
7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	48
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya manusia .....	15
Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	16
Tabel 2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan.....	17
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2019-2023.....	19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2019-2023.....	20
Tabel 2.6 Jumlah Nelayan Kabupaten Gorontalo Utara.....	22
Tabel 2.7 Data Kelompok, RTP dan Pembudidaya Produktif Tahun 2019-2022.....	23
Tabel 2.8 Rekapitulasi Pengolah dan Pemasar Kabupaten Gorontalo Utara.....	23
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran.....	25
Tabel 3.2 Isu Strategis pada Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan.....	26
Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra dengan RPD 2024-2026.....	28
Tabel 4.2 cascading Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	31
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2024-2026.....	35
Tabel 6.1 Rencana Anggaran, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan.....	41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama.....	48
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci.....	50

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahunan, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahunan, dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahunan. Hal tersebut berlaku pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi : (i) Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahunan, (ii) Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah.

Pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Gorontalo Utara saat ini telah memasuki tahun terakhir perencanaan periode tahun 2018-2023, artinya proses penyusunan rencana pembangunan daerah

dan rencana strategis perangkat daerah untuk periode selanjutnya harus dimulai ditahun 2023. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, telah dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Instruksi Menteri Dalam negeri tersebut intinya menghadapi masa transisi yang bertujuan menyiapkan Dokumen Pembangunan Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota tahun 2024-2026 dimana nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus mengantisipasi kekosongan hukum karena daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah dan sambil menunggu kepala daerah devinitif hasil pemilu. Menjelang Pilkada serentak tahun 2024 nantinya dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi panduan bagi penjabat kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dimasa transisi.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.45/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- 16) Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026 adalah:

1. Untuk menentukan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan pembangunan pada Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024-2026;
3. Menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan yang menjadi tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahunnya;
5. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara; dan
6. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 - 2026.



#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 yang disusun sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan** terdiri atas latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026, serta sistematika penulisan.
- **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah termasuk capaian SPM sesuai tugas pokok dan fungsi. kelompok sasaran layanan.
- **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah** memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah pada Bab II, serta penentuan isu-isu strategis.
- **Bab IV Tujuan dan Sasaran** memuat penjabaran tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Selain itu, menjabarkan rencana kinerja (*cascading*) perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator masing-masing.
- **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan** memuat penjabaran strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah tahun 2024-2026.
- **Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan** menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan rencana pendanaan (pagu indikatif).
- **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan** memuat penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki Tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang kelautan dan Perikanan yang di Pimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana program/kegiatan tahunan tingkat kabupaten yang sejalan dengan perencanaan nasional dan provinsi bidang Kelautan dan Perikanan;
- b) Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang Kelautan dan Perikanan;
- c) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha Kelautan dan Perikanan;
- d) Menyelenggarakan pembinaan atas pengelolaan/pemanfaatan sumber daya Kelautan dan Perikanan;
- e) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a) Menerbitkan dan mencabut perizinan bidang perikanan dan kelautan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajiandata statistik perikanan;
- c) Melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang perikanan dan kelautan;
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,workshop, seminar, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan dan pengusaha perikanan dalam bidang usahanya;

- e) Melaksanakan patroli di perairan laut, sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan konservasi terhadap kualitas lingkungan hidup perairan;
- g) Melaksanakan pelayanan umum lainnya bidang kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 30 Tahun 2016 terdiri dari :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

### **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan serta mengkoordinasikan penyusunan penganggaran. Sekretaris membawahi :

#### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penataan administrasi umum, pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan, penyelenggaraan pelayanan umum dan pengelolaan urusan kepegawaian.

#### **2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program bidang, monitoring, evaluasi, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, pertanggung jawaban dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup dinas.

### **3. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap**

Bidang kelautan dan perikanan tangkap mempunyai tugas meningkatkan produksi hasil tangkapan, meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan dan menyelenggarakan sistem informasi statistik perikanan tangkap, pengawasan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengembangan teknologi.

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap membawahi :

**1) Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Tangkap**

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

**2) Seksi Kenelayanan**

Seksi Kenelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang kenelayanan.

**3) Seksi Sumber Daya Ikan & pengendalian penangkapan ikan**

Seksi Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan sumber daya ikan dan pengendalian penangkapan ikan.

**4. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas dinas dalam bidang perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membawahi :

**1) Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan**

Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan mempunyai tugas memfasilitasi pengolah/pemasaran produk kelautan dan perikanan dalam hal input usahanya.

**2) Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.**

Seksi Bina Mutu, Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan usaha dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.

### **3) Seksi Akses Pasar dan Sistem Logistik**

Seksi Akses Pasar dan Sistem Logistik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan akses pasar dan sistem logistik hasil produk kelautan dan perikanan.

## **5. Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dalam pengembangan usaha perikanan budidaya, sarana perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan budidaya serta eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Bidang Perikanan Budidaya dan Pesisir membawahi :

### **1) Seksi Kawasan Budidaya**

Seksi Kawasan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengembangan dan pengolahan kawasan budidaya ikan.

### **2) Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan**

Seksi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kawasan pariwisata strategis.

### **3) Seksi Produksi Dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan**

Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengembangan produksi usaha budidaya dan pemantauan kesehatan lingkungan perikanan budidaya.

## **6. Jabatan Fungsional Tertentu**

### **1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah**

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

### **2) Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap**

Jabatan Fungsional Pengolah Produksi Perikanan Tangkap Melaksanakan semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan rekomendasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya ikan, dukungan usaha dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai keberlanjutan produktivitas sumber daya hayati

perikanan.

### 3) Jabatan Fungsional Analis Pasar Perikanan

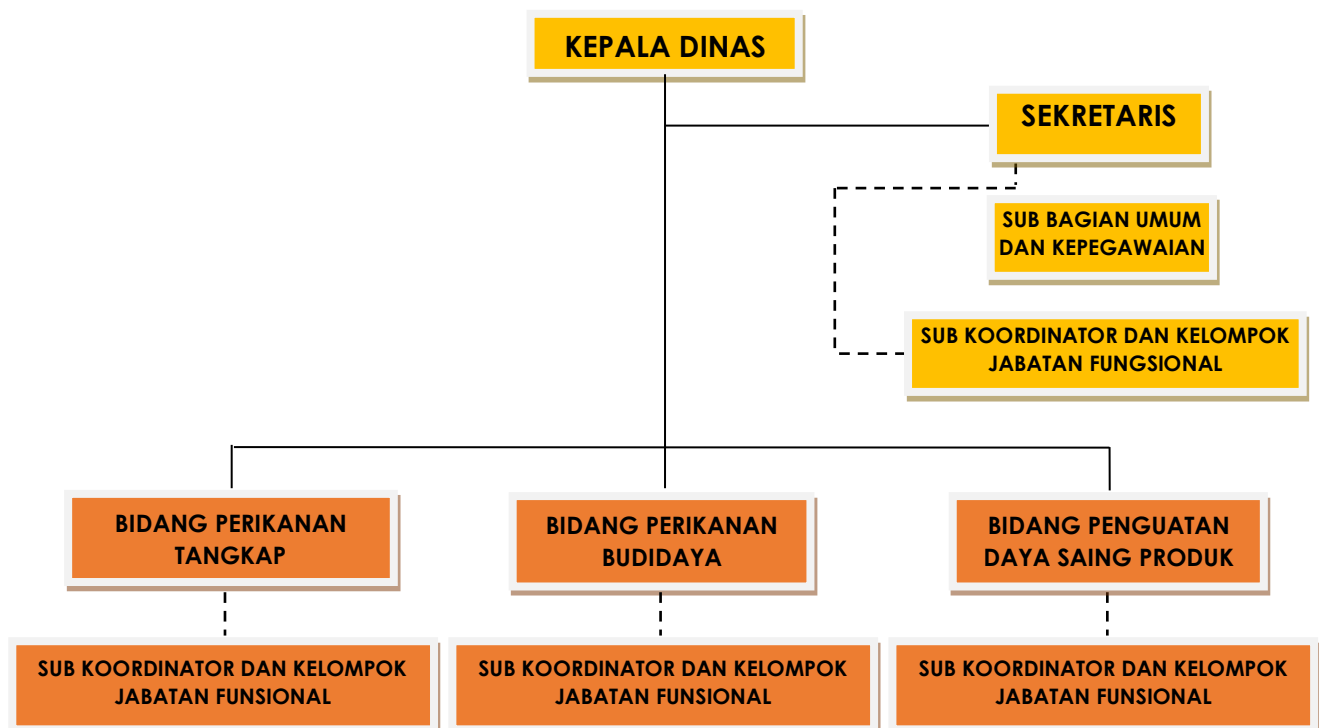
Jabatan Fungsional Analis Pasar Perikanan Melakukan kegiatan analisis pasar hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang analisis pasar hasil perikanan.

### 4) Jabatan Fungsional Analis Penyuluh Perikanan

Jabatan Fungsional Analis Penyuluh Perikanan Melakukan Kegiatan Penyuluhan Perikanan Yang Meliputi Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Serta Pengembangan Penyuluhan Perikanan Sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi dan Tata Kerja**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara**



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut diatas dan dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang professional dan efektif, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki sumber daya aparatur yang cukup memadai. Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2023. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel 2.1 yang diuraikan berdasarkan jabatan, tingkat jabatan/pangkat dan golongan ruang, jumlah pemangku jabatan, hasil Analisis Beban Kerja (ABK), serta jumlah kelebihan dan kekurangan aparatur diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kebutuhan dan Keadaan Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2023**

No	Jabatan	Tingkat Jabatan/ Pangkat/ Gol Ruang	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil ABK	Kelebi- han	Kekura- ngan
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/IVc	1	1	-	-
2	Sekretaris	Pembina Tkt I/ IVb	1	1	-	-
3	Kepala Bidang	Pembina / IVa	2	2	-	-
		Penata Tkt I / IIIId	1	1	-	-
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tkt I / IIIId	1	1	-	-
5	Kepala Seksi	-	-	2	-	2

6	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan daerah	Penata Muda Tkt I / IIIb	1	1	-	-
7	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Penata / IIIc	1	1	-	-
8	Fungsional Analis Pasar Perikanan	Penata Tkt I / IIIId Penata Tkt I / IIIId	2 1	2 1	- -	- -
9	Fungsional Analis Penyuluh Perikanan	Penata Tkt I / IIIId	3	3	-	-
10	Staf	Penata Muda / IIIa Penata Muda Tkt I / IIIb Penata / IIIc	3	20	-	6
11	P3K		-	8		8
<b>Jumlah</b>			28	44	-	16

**Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan (Januari 2023)**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan belum sesuai dengan standar kebutuhan. Tentunya hal ini menjadi salah satu catatan penting untuk dapat dilakukan pemenuhan sesuai dengan standar kebutuhan. Kecukupan sumber daya manusia yang kompeten, akan membantu memperlancar organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Kepegawaian Diuraikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	1	-	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	-	1
5	Kepala Seksi	-	-	-	-	-	-	-
6	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan daerah	-	-	1	-	-	-	1
7	Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	-	-	3	-	-	-	3
8	Fungsional Analis Pasar Perikanan	-	-	1	-	-	-	1
9	Fungsional Analis Penyuluh Perikanan	-	-	3	-	-	-	3
10	Staf	-	-	8	6	-	-	14
<b>Jumlah</b>		1	2	19	6	-	-	28
<b>Persentase</b>		3,57	7,14	67,86	21,43	-	-	100

**Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, (Januari 2023)**

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya karena menjadi modal dasar dan menjadi bagian terpenting dalam peningkatan kinerja. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan aparatur Dinas



Kelautan dan Perikanan masih relative sedang yaitu yang terbanyak pertama adalah pendidikan S-1 sebanyak 19 orang (67,86%), diurutan kedua terbanyak adalah pendidikan D-3 sebanyak 6 orang (21,43%), diurutan ketiga adalah pendidikan S-2 sebanyak 2 orang (7,14%) dan diurutan keempat S-3 sebanyak 1 orang (3,57%).

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor, kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian kecil dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya keseluruhan pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Sampai Dengan Tahun 2023**

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak
1	Gedung Kantor	Unit	1	1	-
2	Alat - alat angkutan				-
	- Motor	Unit	27	26	1
	- Mobil	Unit	2	2	-
3	Alat - alat kantor dan rumah tangga	Unit	260	260	-
4	Gedung dan Bangunan	Unit	7	7	-
	Jumlah		297	296	1
<i>Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, (Januari 2023)</i>					

Lokasi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang cukup strategis berada di lingkungan Kantor Bupati Gorontalo Utara (*Block Plan*) memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih efektif dan efisien.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Periode Tahun 2019 - 2023

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi

untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen

rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Selama periode tahun 2019-2023, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan guna menunjang pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 2.4.

Dari sisi anggaran, secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadi Pandemi Covid-19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. Pandemic covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020, bahwa angka Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara menurun sebesar -0,02. Menurunnya angka LPE Kabupaten Gorontalo Utara ini secara signifikan mempengaruhi isu prioritas Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan anggaran yang terbatas, maka anggaran Kabupaten Gorontalo Utara diprioritaskan kepada program pemulihan ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi Perikanan	42.136 ton	50.734	-	43.647	45.314	47.049	48.855	50.734	42.624	34.254	40.422	43.679	-	97,66	75,59	85,91	89,35	-
	- Perikanan Budidaya	17.033 ton	21.738	-	17.334	18.778	19.717	20.703	21.738	17.111	14.179	14.591	17.429	-	98,71	75,51	74,00	84,18	-
	- Perikanan Tangkap	25.103 ton	28.996	-	25.763	26.536	27.332	28.152	28.996	25.513	20.075	25.831	26.250	-	99,03	75,65	94,51	93,24	-
2	Tingkat Konsumsi Ikan	53,74 (kg/kap /thn)	54.2	-	53.7	53.9	54	54.1	54.2	55.34	59.66	63.76	63.90	-	103,05	110,69	118,07	118,11	-

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000.000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp. 000.000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan (Rp. 000.000)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A</b>	<b>Mengacu Pada Permendagri 13 Tahun 2006</b>																	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.294</b>	<b>964</b>	-	-	-	<b>1.290</b>	<b>946</b>	-	-	-	<b>99,69</b>	<b>98,13</b>	-	-	-	<b>1.129</b>	<b>1.118</b>
1.1	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	427	219	-	-	-	426	219	-	-	-	99,99	99,90	-	-	-	322	322
1.2	Kegiatan Penyediaan Operasional Kantor	867	745	-	-	-	864	727	-	-	-	99,64	97,51	-	-	-	806	806
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>126</b>	<b>41</b>	-	-	-	<b>126</b>	<b>40</b>	-	-	-	<b>99,90</b>	<b>98,96</b>	-	-	-	<b>83</b>	<b>83</b>
2.1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	126	41	-	-	-	126	40	-	-	-	99,90	98,96	-	-	-	83	83
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>4.232</b>	<b>4.103</b>	-	-	-	<b>4.160</b>	<b>4.021</b>	-	-	-	<b>98,31</b>	<b>98,00</b>	-	-	-	<b>4.167</b>	<b>4.090</b>
3.1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	4.232	4.103	-	-	-	4.160	4.021	-	-	-	98,31	98,00	-	-	-	4.167	4.090
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>1.473</b>	<b>1.095</b>	-	-	-	<b>1.471</b>	<b>1.091</b>	-	-	-	<b>99,89</b>	<b>99,66</b>	-	-	-	<b>1.284</b>	<b>1.281</b>
4.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	1.473	1.095	-	-	-	1.471	1.091	-	-	-	99,89	99,66	-	-	-	1.284	1.281
<b>5</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>1.202</b>	<b>1.012</b>	-	-	-	<b>1.165</b>	<b>931</b>	-	-	-	<b>96,96</b>	<b>91,99</b>	-	-	-	<b>1.107</b>	<b>1.048</b>
5.1	Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Tempat Pelelangan Ikan	5	-	-	-	-	4	-	-	-	-	99,66	-	-	-	-	2,5	2
5.2	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.097	995	-	-	-	1.065	914	-	-	-	97,09	91,85	-	-	-	1.046	989
<b>5.3</b>	<b>Kegiatan Lomba Cipta Menu Serba Ikan Tingkat Kabupaten</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>51</b>	<b>6</b>	-	-	-	<b>93,38</b>	<b>100</b>	-	-	-	<b>30,5</b>	<b>28,5</b>
5.4	Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Perikanan	44	10	-	-	-	43	10	-	-	-	98,00	100	-	-	-	27	26,5
<b>B</b>	<b>Mengacu Pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021</b>																	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	-	-	3.511	3.565	3.019	-	-	3.484	3.547	-	-	-	99,24	99,50	-	3.395	3.515

## RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 - 2026

1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.628	2.436	2.529	-	-	2.625	2.423	-	-	-	99,88	99,47	-	2.531	2.524
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	300	223	56	-	-	300	222	-	-	-	99,95	99,56	-	193	261
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	499	556	326	-	-	485	552	-	-	-	97,08	99,41	-	460	518
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	83	349	106	-	-	74	349	-	-	-	89,22	99,79	-	179	211
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN PERIKANAN TANGKAP</b>	-	-	<b>3.550</b>	<b>5.772</b>	<b>6.310</b>	-	-	<b>3.514</b>	<b>5.656</b>	-	-	-	<b>98,99</b>	<b>97,99</b>	-	<b>5.210</b>	<b>4.585</b>
2.1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kab/Kota	-	-	3.550	5.772	6.310	-	-	3.514	5.656	-	-	-	98,99	97,99	-	5.210	4.585
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	-	-	<b>1.353</b>	<b>1.095</b>	<b>364</b>	-	-	<b>1.351</b>	<b>1.077</b>	-	-	-	<b>99,85</b>	<b>98,34</b>	-	<b>937</b>	1.214
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	-	-	1.353	1.095	364	-	-	1.351	1.077	-	-	-	99,85	98,34	-	937	1.214
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	-	-	<b>842</b>	<b>1.249</b>	<b>869</b>	-	-	<b>840</b>	<b>1.174</b>	-	-	-	<b>99,78</b>	<b>93,94</b>	-	<b>986</b>	1.007
4.1	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	-	-	842	1.249	869	-	-	840	1.174	-	-	-	99,78	93,94	-	986	1.007
	<b>Total</b>	<b>8.328</b>	<b>7.218</b>	<b>9.257</b>	<b>11.684</b>	<b>10.564</b>	<b>8.215</b>	<b>7.031</b>	<b>9.191</b>	<b>11.456</b>	<b>-</b>	<b>98,64</b>	<b>97,42</b>	<b>99,28</b>	<b>98,05</b>	<b>-</b>	<b>9.410</b>	8.973

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Kelautan dan Perikanan menjalankan fungsi di bidang Perikanan, kelompok sasaran layanan Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

### 1) Nelayan

Klasifikasi nelayan menurut statistik perikanan KKP terbagi menjadi tiga golongan, yaitu nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan penuh hanya memiliki satu mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan dan hanya menggantungkan hidupnya dengan profesinya sebagai nelayan serta tidak memiliki keahlian lain selain sebagai nelayan. Nelayan sambilan utama menjadikan nelayan sebagai profesi utama tetapi memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan. Sedangkan nelayan sambilan tambahan memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan dan pekerjaannya sebagai nelayan hanya untuk tambahan penghasilan, Adapun jumlah nelayan di sebelas kecamatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada table 2.6 di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara**  
**Tahun 2021 s.d 2022**

No.	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		RTP	KTP	RTP	KTP	
1	Gentuma Raya	705	566	227	199	
2	PoneloKepulauan	1,175	822	765	703	
3	SumalataTimur	678	210	592	196	
4	Tomilito	553	376	317	352	
5	Atinggola	258	136	193	114	
6	Biau	285	71	270	108	
7	Tolinggula	504	222	361	274	
8	Sumalata	708	283	571	272	
9	Monano	426	202	300	197	
10	Anggrek	827	595	385	404	
11	Kwandang	639	373	400	346	
<b>Jumlah</b>		<b>6.758</b>	<b>3.856</b>	<b>4.381</b>	<b>3.165</b>	

### 2) Pembudidaya Ikan

Dari segi sumber daya perikanan budidaya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya dan Jumlah Kelompok sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Data Kelompok, RTP dan Pembudidaya Produktif**  
**Tahun 2019 – 2022**

NO	KOMODITAS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		KEL	RTP	Prod uktif	KEL	RTP	Prod uktif	KEL	RTP	Prod uktif	KEL	RTP	Prod uktif
1	Rumput Laut	53	521	49	53	521	45	53	521	32	53	527	50
2	Tambak	28	278	190	28	278	110	28	278	203	28	278	203
3	Kolam	44	437	205	44	437	350	44	437	360	44	437	370
4	KJA Tawar	6	58	52	6	58	50	6	58	56	7	63	60
5	KJA Laut	28	274	136	28	274	200	28	274	243	28	334	249
	<b>JUMLAH</b>	<b>160</b>	<b>1.573</b>	<b>136</b>	<b>160</b>	<b>1.573</b>	<b>745</b>	<b>160</b>	<b>1.573</b>	<b>894</b>	<b>160</b>	<b>1.573</b>	<b>932</b>

Dari Table di atas, jumlah kelompok dan RTP pembudidaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan bahkan terkesan statis karena memang jumlah pembudidaya dan jumlah kelompok tidak banyak berubah dikarenakan kelompok yang terbentuk sebagian besar merupakan kelompok yang lama yang hanya berubah pada keanggotaan saja namun tidak merubah jumlah kelompok dan RTP.

### 3) Pengolah/Pemasar hasil perikanan

Dari segi sumber daya Pengolah dan Pemasar Perikanan, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki Jumlah Pengolah dan pemasar Perikanan sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Rekapitulasi Pengolah Dan Pemasar Perikanan**  
**Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	PENGOLAHAN (Org)					PEMASAR (Org)	KET
		IKAN ASAP			PENGERINGAN	LAINNYA		
		CAKALANG	ROA	REGI				
1	Atinggola	-	-	-	-	-	21	-
2	Gentuma Raya	13	36	-	-	-	149	-
3	Tomilito	-	-	-	-	-	25	-
4	Ponelo Kepulauan	-	-	-	-	10	35	-
5	Kwandang	-	-	-	-	10	173	-
6	Anggrek	-	-	-	10	-	23	-
7	Monano	-	-	-	-	-	13	-
8	Sumalata Timur	-	-	-	12	-	30	-
9	Sumalata	-	-	-	-	-	35	-
10	Biau	-	-	-	-	-	11	-
11	Tolinggula	-	-	-	-	-	14	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan**

Berdasarkan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024-2026, secara umum pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara diarahkan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

- a. Aspek kesejahteraan masyarakat
  1. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah
  2. Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja
  3. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat masih tinggi
  4. Prevalensi stunting masih tinggi
  5. Pembangunan sumberdaya manusia belum optimal
  6. Efektivitas pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam yang bernilai ekonomis masih rendah
- b. Aspek daya saing
  1. Pembangunan ekonomi belum optimal, transformasi struktural ekonomi yang lambat, serta tantangan pemulihan ekonomi pasca pandemic
  2. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar
  3. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana
  4. Tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
  5. Upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah kurang optimal
  6. Iklim keamanan dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat tiga tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara tiga tahun mendatang.



Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Armada Penangkapan ikan masih didominasi armada kecil	Terbatasnya jangkauan wilayah penangkapan ikan	Terbatasnya kapasitas armada penangkapan ikan
		Rendahnya kapasitas SDM nelayan	Rendahnya SDM Nelayan
		Tingginya ketergantungan nelayan terhadap faktor alam	Minimnya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan
		Rendahnya modal usaha nelayan	Minimnya akses permodalan bagi nelayan
		Rentannya kecelakaan nelayan ketika melaut	Rendahnya jaminan sosial bagi nelayan
		Lemahnya nilai tawar nelayan	Rendahnya kelembagaan nelayan
2	Area Budidaya Perikanan masih belum optimal	Rendahnya managerial usaha budidaya perikanan	Minimnya managerial usaha pembudidayaan perikanan yang baik
		Belum optimalnya produksi budidaya	Rendahnya penerapan teknologi cara budidaya ikan yang baik
3	Nilai tambah komoditi perikanan masih terbatas	Rendahnya nilai tambah komoditi/produk hasil perikanan	Rendahnya diversifikasi produk/komoditi hasil perikanan
		Belum optimalnya jaringan pemasaran komoditi/produk perikanan	Terbatasnya akses pasar komoditi/produk hasil perikanan

### 3.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berikut diuraikan isu strategis pada Urusan Kelautan dan Perikanan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Isu Strategis Pada Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	Aspek	Isu Strategis
1	Tingginya ketergantungan nelayan terhadap faktor alam	Minimnya pemanfaatan teknologi penangkapan ikan
2	Rendahnya kapasitas SDM nelayan	Rendahnya SDM Nelayan
3	Terbatasnya jangkauan wilayah penangkapan ikan	Terbatasnya kapasitas armada penangkapan ikan
4	Rendahnya modal usaha nelayan	Minimnya akses permodalan bagi nelayan
5	Rentannya kecelakaan nelayan ketika melaut	Rendahnya jaminan sosial bagi nelayan
6	Lemahnya nilai tawar nelayan	Rendahnya kelembagaan nelayan
7	Rendahnya managerial usaha budidaya perikanan	Minimnya managerial usaha pembudidayaan perikanan yang baik
8	Belum optimalnya produksi budidaya	Rendahnya penerapan teknologi cara budidaya ikan yang baik
9	Rendahnya nilai tambah komoditi/produk hasil perikanan	Rendahnya diversifikasi produk/komoditi hasil perikanan
10	Belum optimalnya jaringan pemasaran komoditi/produk perikanan	Terbatasnya akses pasar komoditi/produk hasil perikanan

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam penyusunan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024-2026 telah berpedoman dan mengacu pada tujuan dan sasaran daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan hubungan keselarasan pembangunan antara daerah dengan perangkat daerah khususnya pada *urusan Kelautan dan Perikanan*.

Keterkaitan tujuan dan sasaran Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dengan RPD**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan RPD		Sasaran RPD		Tujuan Renstra		Sasaran Renstra	
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan yang berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Predikat AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah
Terbangunnya perekonomian yang inklusif serta berdaya saing yang disertai penghidupan yang layak, dan pemerataan kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penduduk miskin</li> <li>- Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan</li> <li>- Indeks Ketahanan Pangan</li> <li>- Tingkat kemiskinan ekstrem</li> </ul>	Peningkatan Produksi perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkal (Ton/Tahun) 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) 3. Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Meningkatkan Produksi dan Kualitas Sektor Perikanan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2. Jumlah produksi perikanan budidaya 3. Angka konsumsi ikan

#### 4.2 Cascading Kinerja

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran.

Memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Tentunya kontribusi yang dimaksud harus disesuaikan dengan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan kepada masing-masing. Untuk mendapatkan aparatur negara yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian kinerja organisasi, maka perlu dilakukan penjabaran dan penyelarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Setiap individu harus mengambil bagian dan berperan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Hal tersebut karena apabila program/kegiatan yang dialokasikan tidak memiliki daya ungkit terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi, maka anggaran yang digunakan untuk membiayainya akan sia-sia, atau dengan kata lain telah terjadi pemborosan anggaran.

Dalam praktiknya memanfaatkan sumber daya aparatur dan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah. Sampai dengan saat ini, masih ditemukan di banyak kondisi instansi pemerintah, diantaranya (1) sebagian besar aparatur tidak memiliki kontribusi kinerja yang jelas bagi pencapaian kinerja organisasi; serta (2) desain program/kegiatan tidak memiliki dampak/daya ungkit bagi pencapaian tujuan organisasi. Kedua hal tersebut mengakibatkan pemborosan anggaran yang terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dalam hal manajemen SDM, kinerja aparatur yang tidak jelas dan tidak terukur membuat mekanisme reward and punishment menjadi tidak fair, dan pengembangan kompetensi dan keahlian menjadi tidak terarah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024-2026, telah dirumuskan rencana kinerja aparatur untuk memastikan setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

**Tabel 4.2**  
**Cascading Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2024-2026**

PK KEPALA PD				PK ESELON III			PK ESELON IV / JAFUNG					
Kinerja Strategis Sektor /Bidang Urusan (Intermediate Outcome)		Kinerja Strategis Sektor /Sub Bidang Urusan (Intermediate Outcome)		Kinerja Strategis Sub Sektor/Kinerja Manajerial (Intermediate Outcome)			Kinerja Manajerial (Immediate Outcome)			Kinerja Operasional		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Predikat AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Sesuai Target	Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi Pengurusan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
										Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Yang diadakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

## RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 - 2026

							Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah				
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Peningkatan Produksi perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkal (Ton/Tahun) 2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun) 3. Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Meningkatkan Produksi dan Kualitas Sektor Perikanan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2. Jumlah produksi perikanan budidaya 3. Angka konsumsi ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Terlaksananya Program Pengolahan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam DaerahKab/Kota	- Jumlah produksi - Jumlah nelayan/kelompok nelayan yg dibina	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya
										Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya
										Pelaksanaan Fasilitas Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
							Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan



## RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 - 2026

							Pelelangan Ikan (TPI)					
										Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Terlaksananya Program Pengolahan Perikanan Budidaya	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dibina (Kelompok)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
										Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas
										Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
							Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
										Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal	Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana,

## RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024 - 2026

										Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan
							Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
										Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Terlaksananya Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
										Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Secara lengkap keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas/Reguler		
					2024	2025	2026
Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Aset, Kepegawaian dan budaya kerja organisasi	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Reguler	Reguler	Reguler
				Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Reguler	Reguler	Reguler
				Peningkatan Kualitas penatausahaan Keuangan dan Aset	Reguler	Reguler	Reguler
				Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Reguler	Reguler	Reguler
				Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Organisasi, Penyusunan Proses Bisnis dan SOP	Reguler	Reguler	Reguler
<b>Peningkatan Produksi perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan</b>	Meningkatkan Produksi dan Kualitas Sektor Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Meningkatkan Produktivitas dan daya saing produk hasil perikanan tangkap	Restrukturisasi armada perikanan tangkap	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Pendampingan dan Pembinaan Kelompok –kelompok Nelayan	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Penurunan tingkat losses penanganan ikan diataskapal	Prioritas	Prioritas	Prioritas

				melalui penerapan Good Handling Practices.			
		Peningkatan Produksi perikanan budidaya (Ton)	Intensifikasi perikanan budidaya melalui Penyediaan benih unggul dan pakan.	Mendorong berkembangnya industri pakan ikan skala rumah tangga, pendampingan teknologi produksi, pendampingan manajemen	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Peningkatan cara berproduksi ikan budidaya yang baik, sesuai dengan persyaratan standar CBIB dan CPIB	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Peningkatan produksi & produktivitas pembudidaya ikan skala kecil melalui Penyediaan akses sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai	Prioritas	Prioritas	Prioritas
			Penguatan dan Pembinaan SDM Pembudidaya Ikan	Pendampingan dan Pembinaan Kelompok – kelompok Pembudidaya Pembudidaya melalui prinsip Cara Perbenihan Yang Baik (CPIB)	Prioritas	Prioritas	Prioritas
		Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapt/thn)	Menciptakan sistem pemasaran dan distribusi produk perikanan yang efisien, aman, dan berkualitas	Peningkatan cara Penanganan Hasil perikanan tangkap dan budidaya yang baik dan benar melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman nelayan dan Pembudidaya tentang kode etik perikanan yang bertanggung jawab (CCRF) dan Good Handling Practices	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Percepatan Implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) melalui optimalisasi sistem klustering dan konektivitas antar wilayah produksi dan pemasaran	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Peningkatan branding produk perikanan melalui promosi dan pengemasan produk yang sehat dan menarik.	Prioritas	Prioritas	Prioritas
				Budidaya ikan di perairan laut, dan payau) harus memakai	Prioritas	Prioritas	Prioritas

				pakan ikan ramah lingkungan yaitu pakan ikan yang konversi pakan rendah (efisien) dan tidak mengandung zat/bahan yang berpotensi merusak lingkungan.			
			Melakukan Gerakan Sosial memasyarakatkan makan Ikan	Gerakan memasyarakatkan makan Ikan (Gemar IKan) di lingkungan sekolah melalui kegiatan fisht School	Prioritas	Prioritas	Prioritas

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun diatas, selanjutnya ditetapkan sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Rencana program dilengkapi dengan outcome beserta target capaiannya serta pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan keluaran beserta target capaiannya dan pagu indikatif. Outcome program dan output kegiatan/sub kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah, yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan/sub kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026**

Tujuan/Sasaran	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Formulasi	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2022)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Pada Akhir Periode		Unit Kerja
						2024		2025		2026				
						Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan : Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan													Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan		Predikat AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Predikat AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Predikat	N/A	B		B		B		B		
Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kelautan dan Perikanan		Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat Daerah	Nilai	N/A	60		65		70		70		
	1.1 Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Akumulasi Capaian Kinerja Program PD ----- X 100 Jumlah Indikator Kinerja Program PD	Nilai	99,50	93	2,630,385,996	95	2,643,537,926	97	2,656,755,615	97	7,930,679,537	
	1.1.1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Yang Terpenuhi Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Keuangan ----- X 100 Total Sub Kegiatan Yang Dilaksanakan	%	99,47	100	2,529,520,522	100	2,529,520,522	100	2,529,520,522	100	7,588,561,566	
	1.1.1.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	27	30	2,529,520,522	32	2,529,520,522	34	2,529,520,522	34	7,588,561,566	
	1.1.2 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengurusan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang di urus tepat waktu ----- X 100 Total Administrasi Kepegawaian yang di urus	%	-	-	-	100	5,000,000	100	5,000,000	100	10,000,000	
	1.1.2.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	



<b>1.1.3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah ----- X 100 Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>99,56</b>	<b>100</b>	<b>31,865,474</b>	<b>100</b>	<b>31,865,474</b>	<b>100</b>	<b>41,083,163</b>	<b>100</b>	<b>104,814,111</b>	
1.1.3.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	3,000,000	
1.1.3.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	15,000,000	
1.1.3.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	1,500,000	
1.1.3.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	4,000,000	2	4,000,000	2	4,000,000	2	12,000,000	
1.1.3.5 Sub Kegiatan : Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	2	3,000,000	
1.1.3.6 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	35	20,365,474	40	20,365,474	45	29,583,163	45	70,314,111	
<b>1.1.4 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Presentase Barang yang diadakan</b>	<b>Jumlah Barang yang diadakan ----- X 100 Rencana Pengadaan barang</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100</b>	<b>3,000,000</b>	
1.1.4.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	3,000,000	1	3,000,000	
<b>1.1.5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Ketersediaan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Realisasi Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ----- X 100 Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>99,41</b>	<b>100</b>	<b>39,000,000</b>	<b>100</b>	<b>39,000,000</b>	<b>100</b>	<b>39,000,000</b>	<b>100</b>	<b>117,000,000</b>	
1.1.5.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	31,500,000	1	31,500,000	1	31,500,000	1	94,500,000	
1.1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	
1.1.5.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	7,500,000	

	1.1.6 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik ----- X 100 Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	%	99,79	100	30,000,000	100	38,151,930	100	39,151,930	100	107,303,860	
	1.1.6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	30,000,000	2	33,151,930	2	33,151,930	2	96,303,860	
	1.1.6.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	1	1,000,000	1	1,000,000	
	1.1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	
Peningkatan Produksi perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Produksi tahun ke (n) - Produksi tahun ke (n-1)	Ton	n/a	1000		1000		1000		1000		
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Produksi tahun ke (n) - Produksi tahun ke (n-1)	Ton	n/a	523		538		555		555		
		Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Jumlah Konsumsi Ikan Tahun ke (n) - Jumlah Konsumsi Ikan (n-1)	Kg/kap/Thn	n/a	9,30		0,10		0,10		0,10		
Meningkatkan Produksi dan Kualitas Sektor Perikanan		Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	26250	27250		28250		29250		29250		
		Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	17429	17952		18490		19045		19045		
		Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Thn	63,90	61,00		61,50		62,00		62,00		
	1.2 Program : Pengolahan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Volume produksi perikanan dihitung melalui metode sampling atau cacah lengkap produksi seluruh RTP (Rumah Tangga Perikanan ) Nelayan	Ton	26250	27250	4,587,500,000	28250	6,033,300,000	29250	7,240,700,000	29250.000	17,861,500,000	

<b>1.2.1 Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kab/Kota</b>	<b>- Jumlah produksi</b>  <b>- Jumlah nelayan/kelompok nelayan yg dibina</b>	<b>- Jumlah produksi penangkapan ikan = produksi pelabuhan + produksi non pelabuhan</b> <b>- Jumlah nelayan/kelompok yg dibina = nelayan penerima bantuan sapras + penerima bantuan sosail + peserta</b>	<b>Ton</b>  <b>Kelompok</b>	<b>26250</b>  <b>12</b>	<b>27250</b>  <b>5</b>	<b>4,128,750,000</b>	<b>28250</b>  <b>6</b>	<b>5,429,970,000</b>	<b>29250</b>  <b>7</b>	<b>6,516,630,000</b>	<b>29250</b>  <b>7</b>	<b>16,075,350,000</b>	
1.2.1.1 Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	265	150	3,303,000,000	160	4,343,976,000	170	5,213,304,000	170	12,860,280,000	
1.2.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	-	4	495,450,000	4	651,596,400	4	781,995,600	4	1,929,042,000	
1.2.1.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	-	5	330,300,000	5	434,397,600	5	521,330,400	5	1,286,028,000	
<b>1.2.2 Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>- Jumlah SOP pelayananan TPI yg dibuat (SOP)</b> <b>- Jumlah sapras fasilitas TPI (unit)</b>	<b>- Jumlah SOP pelayananan TPI yg dibuat (SOP)</b> <b>- Jumlah sapras fasilitas TPI (unit)</b>	<b>Dokumen</b>  <b>Unit</b>	<b>-</b>  <b>-</b>	<b>1</b>  <b>10</b>	<b>458,750,000</b>	<b>1</b>  <b>10</b>	<b>603,330,000</b>	<b>1</b>  <b>10</b>	<b>724,070,000</b>	<b>1</b>  <b>10</b>	<b>1,786,150,000</b>	
1.2.2.1 Sub Kegiatan : Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	-	2	183,500,000	2	241,332,000	2	289,628,000	2	714,460,000	
1.2.2.2 Sub Kegiatan : Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	-	2	275,250,000	2	361,998,000	2	434,442,000	2	1,071,690,000	
<b>1.3 Program : Pengolahan Perikanan Budidaya</b>	<b>Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)</b>	<b>Volume produksi perikanan dihitung melalui metode sampling atau cacah lengkap produksi seluruh RTP (Rumah Tangga)</b>	<b>Ton</b>	<b>17429</b>	<b>17952</b>	<b>2,106,250,000</b>	<b>18490</b>	<b>2,820,450,000</b>	<b>19045</b>	<b>3,380,550,000</b>	<b>19045</b>	<b>8,307,250,000</b>	
<b>1.3.1 Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dibina (Kelompok) Perikanan ) Pembudidaya</b>	<b>Jumlah Kelompok Pembudidaya yang dibina (Kelompok) Perikanan ) Pembudidaya</b>	<b>Kelompok</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1,306,000,000</b>	<b>5</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>5</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5</b>	<b>5,106,000,000</b>	
1.3.1.1 Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	2	450,000,000	2	650,000,000	2	750,000,000	2	1,850,000,000	
1.3.1.2 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	-	2	428,125,000	2	550,000,000	2	600,000,000	2	1,578,125,000	

1.3.1.3 Sub Kegiatan : Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	-	1	427,875,000	1	600,000,000	1	650,000,000	1	1,677,875,000	
1.3.2 Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	-	1	100,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	700,000,000	
1.3.2.1 Sub Kegiatan :Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	-	10	50,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	350,000,000	
1.3.2.2 Sub Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	-	10	50,000,000	10	150,000,000	10	150,000,000	10	350,000,000	
1.3.3 Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Ton	-	17952	700,250,000	18490	720,450,000	19045	1,080,550,000	19045	2,501,250,000	
1.3.3.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dok	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	400,000,000	1	1,000,000,000	
1.3.3.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	1	125,000,000	1	125,000,000	1	200,000,000	1	450,000,000	

1.3.3.3 Sub Kegiatan : Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	1	125,000,000	1	125,000,000	1	200,000,000	1	450,000,000	
1.3.3.4 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	-	10	80,000,000	10	85,000,000	10	150,000,000	10	315,000,000	
1.3.3.5 Sub Kegiatan : Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	-	10	70,250,000	10	85,450,000	10	130,550,000	10	286,250,000	
<b>1.4 Program : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)</b>	<b>Tingkat Konsumsi Ikan dihitung menggunakan rumus : <math>TKI = (VB+VT) - (VE+VL)/JW</math> Dimana : TKI = Tingkat Konsumsi Ikan VB = Volume Perikanan Budidaya VT = Volume Perikanan Tangkap VE = Volume Perikanan yang diekspor/antar pulau VL = Volume Losses JW = Jumlah penduduk</b>	<b>Kg/kap/ Thn</b>	<b>63,90</b>	<b>61,00</b>	<b>1,431,250,000</b>	<b>61,50</b>	<b>2,021,250,000</b>	<b>62,00</b>	<b>2,403,750,000</b>	<b>62,00</b>	<b>5,856,250,000</b>	
<b>1.4.1 Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan</b>	<b>Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)</b>	<b>Jumlah Produksi Olahan Perikanan (Ton)</b>	<b>Ton</b>	<b>18.675</b>	<b>19.235</b>	<b>1,431,250,000</b>	<b>19.812</b>	<b>2,021,250,000</b>	<b>20.407</b>	<b>2,403,750,000</b>	<b>20.407</b>	<b>5,856,250,000</b>	
1.4.1.1 Sub Kegiatan : Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	-	19.235	357,812,500	19.812	505,312,500	20.407	600,937,500	20.407	1,464,062,500	
1.4.1.2 Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	45	40	1,073,437,500	45	1,515,937,500	50	1,802,812,500	50	4,392,187,500	
<b>Total</b>						<b>10,755,385,996</b>		<b>13,518,537,926</b>		<b>15,681,755,615</b>		<b>39,955,679,537</b>	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Tujuan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah :

1. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih Perangkat Daerah selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah utamanya kinerja pegawai.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja pegawai. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

Terkait dengan tujuan penyusunan indikator kinerja utama diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyusun indikator kinerja utama tahun 2024-2026 yang diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026. Untuk itu, indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan gambaran kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung indicator kinerja utama daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD tahun 2024-2026 dapat dicapai.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Yang Mengacu Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkal (Ton/Tahun)	Volume Produksi Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan dihitung melalui metode sampling atau cacah lengkap produksi seluruh RTP (Rumah Tangga Perikanan ) Nelayan	Ton	26.250	27.250	28.250	29.250	29.250	
2.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	Volume Produksi Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan dihitung melalui metode sampling atau cacah lengkap produksi seluruh RTP (Rumah Tangga Perikanan)	Ton	17.429	17.952	18.490	19.045	19.045	
3.	Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Tingkat Konsumsi Ikan	Tingkat Konsumsi Ikan dihitung menggunakan rumus : TKI = (VB+VT) - (VE+VL)/JW Dimana : TKI = Tingkat Konsumsi Ikan VB = Volume Perikanan Budidaya VT = Volume Perikanan Tangkap VE = Volume Perikanan yang dielspor/antar pulau VL = Volume Losses JW = Jumlah penduduk	Kg/Kap/Thn	63.90	61.00	61.50	62.00	62.00	

## 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau yang disebut IKK adalah indicator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Realisasi dan capaian IKK pemerintah daerah setiap tahun dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Tujuan penyusunan IKK adalah untuk bahan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berikut disajikan indicator kinerja kunci Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan**  
**Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024-2026**

No	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Formulasi	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
					2022	2024	2025	2026	
1	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar								
1.1	Urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan								
	<b>IKK OUTCOME</b>								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) ----- Target Produksi Perikanan	Ton			45.202	46.740	48.295	48.295
	<b>IKK OUTPUT</b>								
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah nelayan yang memiliki alat tangkap	RTP			4416	4451	4486	4486
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar oprasional ----- x 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara	%			100	100	100	100
3	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Tidak Ada	Tidak ada Kegiatan Pelatihan	-		20	30	40	40
4	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Tidak Ada	Benih	-		-	-	-	-
5	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kotayang diterbitkan	Tidak Ada	Izin			50	100	150	150

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja dan RKA tahun 2024 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja secara periodik.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai

kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara.

Kwandang, Mei 2023  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Dr. FAIZAL PIU, SE. MM  
Nip. 197101091993031004